

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kabupaten Gorontalo periode 2010-2014.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kabupaten Gorontalo periode 2010-2014.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kabupaten Gorontalo periode 2010-2014.
4. secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Darah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan Kelamahan Sistem Pengandalian Intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo periode tahun 2010-2014.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo, namun Pemerintah Kabupaten Gorontalo haruslah tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Mengingat variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu memberikan perhatian lebih berupa pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan belanja modal karena erat kaitannya dengan peyelewengan dalam realisasi penggunaan anggaran. Pencatatan dan pendokumentasian segala bentuk kegiatan belanja mutlak diperlukan guna menghasilkan pelaporan yang transparan.
3. Mengingat variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo periode 2010-2014, maka pemerintah daerah harus memiliki suatu sistem pengendalian pelayanan publik yang exelent sebagai wujud pertanggung jawaban publik.

4. Selain ketiga variable diatas, pemerintah daerah juga wajib memperhatikan variable-variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini guna peningkatan sistem pengendalian intern.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. BPFE: Yogyakarta
- Black, Ken. 2010. *Business Statistic For Contemporary Decision Making*. Edisi 6.
- Darise, Nurlan. 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri, Indeks, Jakarta
- Doyle, Jeffrey, Weili Ge, dan Sarah Mc Vay. 2007. *Determinants of Weakness in Internal Control over Financial Reporting*. *Journal of Accounting and Economics* 44, 193-223.
- Efferin, Sujoko; Hadi Darmadji, Stevanus; Tan, Yuliawati. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kulitatif*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2009. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*
- <https://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agenttheory/abdul-halim-dan-syukriy-abdullah/> diakses pada 15 Februari 2016.
- Hartono, dkk. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintahan Daerah*. Jurnal SNA 17 Mataram, Lombok.
- Iskandar, Maolana. 2012. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Periode 2006-2010)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta

- Martani; Zaelani. 2012. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- Nurwati; Trisnawati. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012)*. Syariah Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Petrovits, Christine, Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Aimee. (2010). *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*.
- Putri, Novi Kumala. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat tahun 2012)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Malang.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Saputra, Mudakir. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Jurnal, Universitas Dipenogoro.
- Saputro, Eko Adi. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Sarwono; Suhayati. 2010. *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2007 *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM PRESS
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep Aplikasi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Wahono, Arif Kurniawan. 2015. *Factors that Influence Internal Control Weakness of Local Government (Empirical Study on Provincial Government in Indonesia)*. Jurnal.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Sumber Lain

<https://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/syukri-abdullah-dan-jhon-andra-asmara/>

<https://dukuntansi.wordpress.com/2012/01/03/teori-agensi/>

http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2014/lkpp_2014_1433387065.pdf